

Transformasi SDM Surveyor Marine Independen: Kajian Kritis Terhadap Kompetensi, Profesionalisme, dan Tuntutan Layanan

Samekto Siswanto, Sitti Rakhman

Penulis

Samekto Siswanto
Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi
Trisakti
s.siswanto@gmail.com

Sitti Rakhman
Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi
Trisakti
sittirakhman99@gmail.com

Abstract

The maritime industry's shift due to digitalization and stricter regulations requires adjustments in the skills of Independent Marine Surveyors (IMS). This research seeks to analyze the human resource (HR) transformation of IMS at Company X, concentrating on skills, professionalism, and service requirements. The approach employed is critical descriptive qualitative research via semi-structured interviews with three selected informants: one senior IMS, one marine insurance broker from a joint venture, and one marine underwriter. The findings reveal a notable digital skills disparity between senior and junior stakeholders surveyors, a lack of alignment between STCW 2010 Manila Amendments and IMS's particular requirements, and constant pressure from concerning report content. A central observation is the 3D approach Data, Diplomacy, and Documentation that surveyors effectively utilize to uphold the impartiality and integrity of reports. The research finds that an optimal IMS HR transformation framework should combine technical-digital skills with ethical professionalism. The practical consequence is that Company X must create a cohesive training program, implement a reciprocal mentoring system, and provide ethical diplomacy training to guarantee that the quality of survey reports stays reliable in the face of rapid, evidence-driven service requirements.

Keywords: maritime HR, Independent Marine Surveyor, digital competence, professionalism, fairness

Abstrak

Perkembangan digitalisasi dan regulasi di sektor maritim menuntut peningkatan kompetensi Independent Marine Surveyor (IMS). Penelitian ini menganalisis perubahan sumber daya manusia (SDM) IMS di Perusahaan X, khususnya pada aspek kompetensi, profesionalisme, dan kebutuhan layanan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur dengan tiga informan, yaitu seorang IMS senior, broker asuransi marine joint venture, dan marine underwriter asuransi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan digital antara surveyor senior dan junior. Selain itu, standar STCW 2010 Amandemen Manila belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kompetensi IMS, sementara tuntutan pemangku kepentingan terhadap isi laporan menjadi tantangan yang umum dihadapi. Penelitian ini juga menemukan strategi 3D (Data, Diplomasi, dan Dokumen) yang digunakan surveyor untuk menjaga objektivitas dan independensi laporan. Kesimpulannya, transformasi SDM IMS perlu mengintegrasikan kompetensi teknis dan digital dengan profesionalisme etis. Oleh karena itu, Perusahaan X disarankan mengembangkan pelatihan terpadu, program mentoring dua arah, serta pelatihan diplomasi profesional guna menjaga kualitas laporan survei yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya.

Kata kunci: SDM maritim, Independent Marine Surveyor, kompetensi digital, profesionalisme, fairness

Pendahuluan

Industri maritim global saat ini berada dalam fase transformasi yang ditandai oleh meningkatnya digitalisasi, penguatan standar kepatuhan, dan tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi. Perubahan tersebut mendorong pelaku industri untuk menyesuaikan kompetensi agar mampu merespons perkembangan teknologi, standardisasi proses, dan ekspektasi pemangku kepentingan yang terus berkembang. Dalam konteks ini, SDM tidak lagi dipandang semata sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai aset strategis yang menentukan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan mempertahankan kepercayaan pasar. Dalam perspektif ekonomi SDM, peningkatan kompetensi dapat dipahami sebagai bentuk investasi yang mendorong produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah layanan (Tucker, 2011). Sejalan dengan itu, kebutuhan terhadap kompetensi digital, pengelolaan bukti, dan keterlacakan data menjadi semakin penting dalam praktik kerja maritim modern (Autsadee et al., 2023; Emad & Ghosh, 2024; Theotokas, Lagoudis, & Raftopoulou, 2024).

Salah satu profesi yang turut mengalami tekanan perubahan tersebut adalah surveyor maritim independen (*Independent Marine Surveyor*). Dalam praktik industri, surveyor maritim independen memiliki peran penting karena hasil survei digunakan sebagai dasar untuk menilai kondisi objek, kronologi kejadian, validasi kerusakan, evaluasi risiko, dan penyelesaian klaim asuransi (International Institute of Marine Surveying, n.d.). Laporan survei tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga memiliki nilai profesional, komersial, dan yuridis. Oleh karena itu, surveyor dituntut menghasilkan laporan yang akurat, ringkas, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, seperti owner, buyer, broker asuransi, perusahaan asuransi, dan P&I Club (International Institute of Marine Surveying, 2023). Hasil wawancara dalam penelitian ini juga menegaskan bahwa surveyor masa kini harus mampu menyusun dokumentasi digital, evidence yang sistematis, dan laporan yang audit-ready agar dapat menjawab tuntutan layanan yang cepat dan berbasis bukti.

Di sisi lain, surveyor maritim independen memiliki karakter unik karena harus tetap independen dan objektif meskipun berada di tengah berbagai kepentingan stakeholder. Kode Etik International Institute of Marine Surveying menegaskan pentingnya menjaga independensi, objektivitas, dan fairness dalam pelaksanaan tugas survei (International Institute of Marine Surveying, 2019). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tekanan terhadap isi laporan sering muncul dalam bentuk halus, misalnya melalui harapan agar bahasa laporan dibuat lebih lunak atau temuan tertentu diberi penekanan khusus. Kondisi ini menegaskan bahwa independensi bukan hanya prinsip normatif, tetapi juga keterampilan profesional yang harus dijaga secara aktif melalui penguatan integritas, komunikasi, dan dokumentasi yang baik.

Perkembangan regulasi dan standar pelatihan maritim, seperti STCW 2010 Manila Amendments, menunjukkan arah peningkatan standar kompetensi, familiarisasi teknologi, dan profesionalisme dalam sektor maritim (International Maritime

Organization, n.d.). Walaupun STCW pada dasarnya dirancang untuk pelaut, substansi mengenai kompetensi, teknologi, dan standardisasi tetap relevan sebagai referensi dalam membaca kebutuhan profesi maritim yang lebih luas, termasuk surveyor maritim independen. Namun demikian, kebutuhan kompetensi surveyor maritim independen tidak sepenuhnya identik dengan profesi pelaut, sehingga diperlukan pemetaan yang lebih spesifik terhadap konteks kerja survei maritim. Wawancara dengan informan juga mengonfirmasi adanya kesenjangan antara surveyor senior dan junior, terutama pada penguasaan digital reporting, penggunaan perangkat pelaporan, drone, dan pengelolaan bukti digital.

Kajian mengenai surveyor maritim independen di Indonesia masih relatif terbatas, terutama yang menempatkan profesi ini dalam persimpangan antara kompetensi, profesionalisme, dan tuntutan layanan industri. Padahal, lemahnya kompetensi digital, rendahnya kualitas expert judgement, atau terganggunya independensi laporan dapat meningkatkan risiko sengketa klaim, menurunkan kredibilitas profesi, dan melemahkan kepercayaan industri terhadap hasil survei. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi maritim menuntut penyesuaian kompetensi dan sistem kerja yang lebih responsif terhadap perubahan industri, sementara etika profesi tetap menjadi landasan penting dalam menjaga kualitas dan kredibilitas laporan (Autsadee et al., 2023; Emad & Ghosh, 2024; Theotokas et al., 2024; International Institute of Marine Surveying, 2019; 2023).

Untuk memperjelas posisi penelitian ini terhadap kajian sebelumnya, ringkasan penelitian terdahulu yang relevan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Fokus Kajian | Temuan Utama | Kelebihan | Keterbatasan | Relevansi dengan Penelitian Ini |
|------------------------|--|---|--|---|---|
| Autsadee et al. (2023) | Digital tools dan HR development di sektor maritim | Menunjukkan tantangan adopsi teknologi digital dan kebutuhan pengembangan SDM | Relevan untuk konteks digitalisasi maritim | Tidak spesifik membahas surveyor maritim independen | Mendukung argumen pentingnya kompetensi digital |

| Peneliti | Fokus Kajian | Temuan Utama | Kelebihan | Keterbatasan | Relevansi dengan Penelitian Ini |
|--|--|--|---|---|--|
| Emad & Ghosh (2024) | Kerangka kompetensi untuk seafarers masa depan | Menekankan kebutuhan literasi digital, keamanan data, dan kemampuan analitis | Kuat sebagai dasar pengembangan kompetensi maritim modern | Fokus pada pelaut, bukan surveyor | Relevan untuk analogi kebutuhan kompetensi digital surveyor |
| Theotokas, Lagoudis, & Raftopoulou (2024) | Transformasi HR maritim dalam digitalisasi | Menunjukkan digitalisasi menuntut perubahan kompetensi dan sistem kerja | Memberi perspektif makro tentang transformasi maritim | Tidak membahas profesi surveyor secara khusus | Mendukung konteks perubahan industri yang memengaruhi surveyor |
| International Institute of Marine Surveying (2019; 2023) | Peran, etika, dan kualitas laporan surveyor | Menegaskan independensi, objektivitas, dan kredibilitas laporan | Sangat relevan dengan profesi surveyor | Lebih normatif daripada empiris | Menjadi dasar pembahasan profesionalisme surveyor maritim independen |

Sumber: Diolah peneliti dari Autsadee et al. (2023); Emad & Ghosh (2024); Theotokas, Lagoudis, & Raftopoulou (2024); International Institute of Marine Surveying (2019; 2023).

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi SDM surveyor maritim independen dengan fokus pada tiga aspek, yaitu kompetensi, profesionalisme, dan tuntutan layanan. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan perubahan yang terjadi di lapangan, tetapi juga membandingkan temuan empiris dengan literatur yang relevan untuk menunjukkan bagaimana kebutuhan profesi berkembang dan mengapa model penguatan SDM yang integratif menjadi mendesak. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi pada pemahaman yang lebih spesifik mengenai karakter transformasi profesi surveyor maritim independen di

Indonesia, khususnya dalam menghadapi digitalisasi, tekanan stakeholder, dan kebutuhan menjaga kredibilitas laporan.

Secara lebih rinci, penelitian ini menguraikan: pertama, bentuk kesenjangan kompetensi antara surveyor senior dan junior dalam menghadapi tuntutan digitalisasi; kedua, praktik profesionalisme dan strategi menjaga independensi laporan di tengah tekanan stakeholder; dan ketiga, standar kualitas laporan yang diharapkan oleh pengguna jasa survei dari perspektif broker asuransi dan underwriter. Pembahasan pada bagian hasil dan pembahasan selanjutnya akan menunjukkan bahwa kualitas laporan survei tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kemampuan mengelola bukti, menyampaikan temuan secara profesional, dan mempertahankan akuntabilitas dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi SDMSurveyor maritim independen harus dipahami sebagai proses integratif antara kompetensi teknis-digital dan profesionalisme etis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif kritis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam makna, pengalaman, dilema, dan strategi para pelaku profesi dalam menjaga kualitas serta independensi laporan survei maritim (Creswell & Poth, 2018). Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena transformasi SDMSurveyor maritim independen sebagaimana terjadi di lapangan, sedangkan sifat kritis digunakan untuk menelaah kesenjangan antara tuntutan ideal profesi, standar etika, dan praktik nyata yang dihadapi para pelaku (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Pendekatan ini tepat karena fokus penelitian tidak hanya pada apa yang dilakukan surveyor maritim independen, tetapi juga pada bagaimana kompetensi, profesionalisme, dan tuntutan layanan dipahami serta dinegosiasikan dalam konteks hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti owner, buyer, marine insurance broker, dan marine underwriter.

Lokasi, Waktu, dan Batasan Penelitian

Lokasi penelitian adalah perusahaan jasa survei maritim bereputasi di Indonesia yang memberikan layanan kepada owner, buyer, Perusahaan asuransi, dan P&I Club. Pemilihan lokasi didasarkan pada lingkungan kerja yang menuntut kualitas laporan tinggi, kecepatan layanan, serta penerapan prinsip independensi dan fairness secara konsisten. Penelitian dilakukan pada tahun 2026 dengan durasi pengumpulan data selama satu minggu.

Batasan penelitian ini ditetapkan agar fokus kajian tetap terarah.

1. Penelitian hanya melibatkan tiga informan kunci, yaitu seorang surveyor maritim independen senior, seorang marine insurance broker, dan seorang marine underwriter.

2. Penelitian dibatasi pada tiga aspek utama, yaitu kompetensi, profesionalisme, dan tuntutan layanan.
3. Hasil penelitian dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap konteks yang diteliti, bukan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh perusahaan survei maritim di Indonesia.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semiterstruktur dengan tiga informan kunci, yaitu seorang surveyor maritim independen senior, seorang marine insurance broker, dan seorang marine underwriter.

1. Data primer digunakan untuk menggali pengalaman langsung, pandangan, dan strategi para informan terkait kompetensi, profesionalisme, independensi laporan, serta tuntutan layanan dalam praktik survei maritim.
2. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, meliputi kode etik profesi, SOP perusahaan, template laporan, dan literatur yang relevan dengan survei maritim, pengembangan kompetensi, serta transformasi SDM. Data sekunder digunakan untuk memperkuat, membandingkan, dan memverifikasi temuan dari wawancara sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Informan Penelitian

Subjek penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan relevansi pengalaman dan keterlibatannya dalam proses survei maritim. Teknik ini dipilih karena tidak semua pihak dalam ekosistem survei memiliki pengetahuan yang sama mendalam mengenai kompetensi, penyusunan laporan, dan tekanan pemangku kepentingan. Kriteria informan meliputi:

1. Memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun pada bidang yang relevan
2. Pernah terlibat dalam penyusunan, penggunaan, atau penilaian laporan survei maritim
3. Memahami konteks kerja surveyor maritim independent
4. Bersedia menjadi narasumber penelitian. Informan yang diwawancarai terdiri atas tiga pihak, yaitu seorang surveyor maritim independen senior, seorang marine insurance broker, dan seorang marine underwriter. Komposisi ini dipilih untuk memperoleh sudut pandang yang saling melengkapi dari pihak penyedia laporan, pengguna laporan, dan penilai risiko.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, studi dokumen, dan observasi terbatas/non-partisipatif. Wawancara semiterstruktur dipilih karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman informan secara fleksibel namun

tetap terarah pada tema penelitian, yakni kompetensi digital, profesionalisme, independensi laporan, dan tuntutan pemangku kepentingan. Studi dokumen digunakan untuk memperkuat hasil wawancara melalui penelaahan kode etik profesi, SOP perusahaan, template laporan, dan literatur terkait pelaporan survei maritim. Observasi terbatas digunakan sebagai teknik pelengkap untuk menangkap konteks kerja dan interaksi profesional yang tidak selalu terungkap dalam wawancara (Bowen, 2009).

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen ditranskrip, dikodekan, dikategorikan, dan dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu menyeleksi informasi yang relevan dan mengelompokkan data ke dalam tema awal
2. Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi, matriks, dan kutipan verbatim agar pola antar tema dapat dibaca dengan jelas
3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi, yaitu menafsirkan pola temuan dan memeriksanya kembali melalui triangulasi sumber serta perbandingan antarinforman. Pengodean awal mencakup tema kesenjangan kompetensi digital, tuntutan kecepatan layanan, tekanan pemangku kepentingan, independensi laporan, strategi 3D, tick box survey, dan profesionalisme etis.

Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui empat kriteria, yaitu credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Lincoln & Guba, 1985).

1. Credibility dicapai melalui triangulasi sumber dan member checking.
2. Transferability diperkuat dengan deskripsi konteks, karakteristik informan, dan proses penelitian yang rinci.
3. Dependability dijaga melalui pencatatan tahapan penelitian secara sistematis
4. Confirmability dijaga dengan memastikan bahwa hasil analisis didasarkan pada bukti empiris, bukan pada penilaian subjektif peneliti.

Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip persetujuan informan, kerahasiaan, dan penghormatan terhadap profesi. Sebelum wawancara, setiap informan diberi penjelasan tentang tujuan penelitian, ruang lingkup penggunaan data, dan hak untuk menolak menjawab pertanyaan tertentu atau menghentikan partisipasi kapan saja. Identitas informan disamarkan menggunakan kode IMS-EXT, BRK-JV, dan UND-INS untuk menjaga anonimitas. Pendekatan etis ini diterapkan agar proses pengumpulan data tetap menghormati martabat informan dan menjaga keamanan informasi yang dibagikan selama penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi, Informan, dan Proses Analisis Penelitian dilakukan pada perusahaan jasa survei maritim di Indonesia yang melayani marine cargo survey, hull & machinery survey, dan loss prevention. Lokus ini dipilih karena merepresentasikan lingkungan kerja surveyor maritim independen yang berhadapan langsung dengan tuntutan laporan yang cepat, objektif, dapat diaudit, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informan penelitian terdiri atas tiga pihak, yaitu IMS-EXT (Senior Independent Marine Surveyor), BRK-JV (Marine Insurance Broker joint venture), dan UND-INS (Marine Underwriter perusahaan asuransi). Ketiganya dipilih untuk mewakili perspektif penyedia laporan, pengguna laporan, dan penilai risiko.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, studi dokumen, dan observasi terbatas. Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil analisis menunjukkan tiga kelompok temuan utama, yaitu:

1. Kesenjangan kompetensi digital
2. Tekanan pemangku kepentingan dan strategi menjaga independensi
3. Standar kualitas laporan yang diharapkan oleh pengguna jasa. Ketiga temuan ini menjadi dasar pembahasan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan.

Temuan Utama 1: Kesenjangan Kompetensi Digital dalam Transformasi SDM Surveyor Maritim Independen

Temuan pertama menunjukkan bahwa transformasi kompetensi surveyor maritim independen belum berlangsung merata. Masalah utama bukan semata pada penguasaan aspek teknis kapal, tetapi pada kesenjangan kompetensi digital, pengelolaan evidence, dan keterampilan pelaporan. IMS-EXT menegaskan bahwa klien saat ini tidak hanya menilai hasil akhir laporan, melainkan juga kecepatan, kelengkapan bukti, dan kemampuan surveyor menjelaskan temuan secara objektif. BRK-JV menguatkan bahwa evidence yang rapi, timestamp yang jelas, dan dokumentasi yang mudah ditelusuri sudah menjadi ekspektasi pasar. UNDINS menambahkan bahwa laporan harus dapat diaudit dan didukung audit trail yang jelas.

Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi surveyor masa kini tidak lagi cukup bertumpu pada pengalaman lapangan dan pengetahuan teknis. Surveyor dituntut memiliki kemampuan digital reporting, evidence management, dan penyusunan laporan yang audit-ready. Autsadee et al. (2023) menegaskan bahwa penggunaan digital tools dalam sektor maritim mendorong perubahan kebutuhan SDM. Emad dan Ghosh (2024) juga menunjukkan bahwa kompetensi maritim masa depan mencakup literasi digital, kemampuan analitis, dan keamanan data.

Dengan demikian, kesenjangan kompetensi yang ditemukan dalam penelitian ini tidak bersifat insidental, melainkan merupakan gejala transformasi industri yang belum diikuti oleh kesiapan SDM secara merata.

Tabel 1. Akar Masalah Kesenjangan Kompetensi Digital

| Dimensi | Fakta Temuan | Dampak | Implikasi |
|------------------------------|---|---|--|
| Penguasaan digital reporting | Surveyor senior kuat teknis, tetapi belum nyaman dengan software pelaporan, drone, dan visual documentation | Laporan lebih lambat dan kurang rapi secara digital | Diperlukan pelatihan digital reporting yang terstruktur |
| Kesenjangan generasi | Surveyor muda lebih cepat menguasai tools, tetapi judgement teknis lebih dangkal | Integrasi pengalaman dan teknologi belum optimal | Perlu mentoring dua arah senior junior |
| Digital evidence management | Foto/evidence belum selalu disimpan dengan metadata lengkap | Evidence sulit ditelusuri dan diverifikasi | Perlu SOP pengelolaan bukti digital |
| Data security | Pengiriman dokumen masih banyak melalui email biasa / penyimpanan tidak aman | Risiko kebocoran data dan dispute meningkat | Perlu penguatan data privacy dan sistem penyimpanan aman |
| Kurikulum sertifikasi | Materi digital dalam pelatihan masih terbatas | Kompetensi tidak sejalan dengan tuntutan industri | Revisi kurikulum dan program internal training |

Analisis atas temuan ini menunjukkan bahwa kesenjangan kompetensi bersifat struktural, bukan hanya persoalan individu. STCW 2010 Manila Amendments relevan sebagai referensi umum kompetensi maritim, tetapi tidak cukup spesifik untuk kebutuhan kerja surveyor independen.

Karena itu, transformasi SDM perlu dipahami sebagai kebutuhan pengembangan yang menautkan kompetensi teknis, literasi digital, dan tata kelola evidence.

Temuan Utama 2: Tekanan Pemangku Kepentingan, Conflict of Interest, dan Strategi 3D

Temuan kedua memperlihatkan bahwa independensi surveyor diuji melalui tekanan pemangku kepentingan. IMS-EXT menyebutkan bahwa tekanan muncul dalam bentuk halus, seperti harapan agar bahasa laporan dilunakkan, temuan diprioritaskan, atau kesimpulan dibuat lebih aman. BRK-JV dan UND-INS mengonfirmasi bahwa laporan yang terlalu berpihak akan memperbesar dispute dalam proses underwriting maupun claim.

Dengan demikian, konflik tidak hanya muncul pada isi laporan, tetapi juga pada proses negosiasi narasi dan penempatan posisi profesional surveyor. Temuan ini selaras dengan Kode Etik International Institute of Marine Surveying (2019) yang menekankan impartiality dan avoidance of conflict of interest. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa etika saja tidak cukup; surveyor membutuhkan strategi praktis untuk mempertahankan independensi di tengah tekanan relasional. Di sinilah strategi 3D — Data, Diplomasi, dan Dokumen — menjadi mekanisme utama yang dipakai dalam praktik lapangan.

Poin-poin analitis dari temuan ini adalah:

1. Data berfungsi sebagai dasar objektivitas. IMS-EXT menegaskan bahwa seluruh temuan harus kembali pada observasi, pengukuran, foto, video, dan dokumen kapal. Dengan dasar ini, laporan menjadi lebih defensible ketika diuji oleh pihak eksternal.
2. Diplomasi berfungsi sebagai keterampilan komunikasi profesional. BRK-JV menekankan bahwa surveyor harus mampu menjelaskan fakta tanpa konfrontasi, terutama ketika hasil inspeksi tidak sesuai harapan salah satu pihak. Diplomasi menjaga relasi kerja tanpa mengorbankan isi laporan.
3. Dokumen berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas. UND-INS menyebutkan bahwa laporan yang kuat adalah laporan yang memiliki scope jelas, asumsi tertulis, keterbatasan inspeksi diakui, dan lampiran yang lengkap. Dokumen menjadi tameng Ketika laporan dipersoalkan secara hukum maupun komersial.

Strategi 3D memperlihatkan bahwa independensi bukan sifat bawaan, melainkan kompetensi aktif yang dapat dilatih. Data memperkuat objektivitas, diplomasi menjaga hubungan kerja, dan dokumen melindungi surveyor saat laporan dipertanyakan. Dalam konteks ini, strategi 3D merupakan jawaban praktis atas dilema normatif yang selama ini melekat pada profesi surveyor independen: tetap objektif tanpa memutus hubungan bisnis.

Poin-poin analitis mengenai konflik pemangku kepentingan adalah:

1. Tekanan untuk melunakkan istilah berisiko menimbulkan bias wording, sehingga surveyor harus tetap berbasis evidence dan scope yang jelas.
2. Waktu inspeksi yang terbatas mendorong terjadinya tick box survey jika surveyor hanya mengikuti daftar periksa tanpa analisis mendalam.
3. Data yang kurang lengkap memaksa surveyor menulis limitation secara eksplisit dan menolak overclaim.
4. Permintaan hasil yang cepat harus diimbangi dengan preliminary finding yang sudah terverifikasi, bukan kesimpulan tergesa-gesa.

Analisis ini menegaskan bahwa profesionalisme surveyor tidak hanya berkaitan dengan kesopanan komunikasi, tetapi juga dengan kemampuan menetapkan batas profesional secara jelas. Dengan demikian, pertanyaan penelitian kedua terjawab bahwa profesionalisme dipraktikkan melalui kombinasi evidence, komunikasi, dan dokumentasi yang disiplin.

Temuan Utama 3: Perspektif Pemangku Kepentingan Eksternal terhadap Standar Kualitas Laporan

Temuan ketiga menunjukkan bahwa marine insurance broker dan marine underwriter menilai kualitas laporan dari empat kriteria utama: cepat, akurat, objektif, dan dapat ditelusuri. BRK-JV menekankan bahwa kapal tidak bisa menunggu lama dan laporan harus mendukung keputusan claim. UND-INS menegaskan bahwa laporan yang baik harus menunjukkan hubungan yang jelas antara fakta lapangan, foto, dokumen, dan kesimpulan.

Temuan ini sejalan dengan Theotokas, Lagoudis, dan Raftopoulou (2024), yang menunjukkan bahwa digitalisasi maritim menuntut laporan yang lebih cepat dan lebih terdokumentasi. Pada sisi lain, hasil wawancara memperlihatkan bahwa keterlambatan, ketidakjelasan ruang lingkup, atau kesimpulan yang terlalu spekulatif langsung menurunkan nilai guna laporan di mata pengguna jasa. Artinya, kualitas laporan tidak semata ditentukan oleh isi kesimpulan, tetapi oleh proses pengumpulan, penyimpanan, dan penyajian evidence.

Poin-poin analitis dari temuan ini adalah:

1. Kecepatan menjadi indikator responsiveness. Preliminary finding diharapkan cepat, tetapi tidak boleh mengorbankan ketelitian.
2. Akurasi menjadi indikator reliability. Temuan harus didukung bukti yang cukup agar dapat dipakai dalam claim maupun underwriting.
3. Objektivitas menjadi inti kredibilitas profesi. Laporan tidak boleh overclaim atau bias terhadap pihak tertentu.
4. Traceability menjadi syarat auditabilitas. Bukti harus bisa ditelusuri kembali, baik dari sisi waktu, lokasi, maupun sumber pengambilan data. – Transparansi scope menjadi dasar fairness. Laporan yang baik harus jelas mengenai ruang lingkup pemeriksaan dan keterbatasannya agar tidak menimbulkan salah tafsir.

UND-INS menambahkan bahwa laporan yang baik juga harus memiliki ruang lingkup yang jelas agar pengguna dapat membedakan mana temuan yang benar-benar diverifikasi dan mana informasi yang hanya berasal dari pihak ketiga. BRK-JV menguatkan bahwa keterbukaan terhadap keterbatasan inspeksi justru meningkatkan kredibilitas laporan.

Dengan demikian, temuan ketiga menjawab pertanyaan penelitian ketiga bahwa tuntutan pemangku kepentingan menempatkan kecepatan, objektivitas, traceability, dan transparansi sebagai standar minimal kualitas laporan.

Poin-poin analitis mengenai kesenjangan antara ekspektasi pemangku kepentingan dan realitas lapangan adalah:

1. Ekspektasi laporan cepat berhadapan dengan waktu inspeksi yang sering sempit, sehingga kecepatan belum selalu sejalan dengan kedalaman analisis.
2. Ekspektasi bukti lengkap berhadapan dengan evidence yang belum selalu terdokumentasi optimal, sehingga keterlacakan belum konsisten.
3. Ekspektasi objektivitas penuh berhadapan dengan tekanan relasional dari pihak berkepentingan, sehingga independensi belum selalu mudah dijaga.
4. Ekspektasi laporan audit-ready berhadapan dengan format dan penyimpanan yang belum seragam, sehingga standarisasi dokumentasi masih lemah.

Analisis ini memperlihatkan bahwa kesenjangan antara ekspektasi dan realitas tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi juga pada level organisasi dan tata kelola profesi. Oleh karena itu, penguatan kualitas laporan perlu ditempatkan sebagai bagian dari reformasi kompetensi dan tata kelola internal.

Model Transformasi SDM Surveyor Maritim Independen

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini merumuskan model transformasi SDM yang terdiri atas tiga titik utama: input, proses, dan output. Model ini disusun untuk menjelaskan bagaimana transformasi kompetensi dan profesionalisme dapat dilakukan secara sistemik.

Poin-poin analitis model transformasi tersebut adalah:

1. Titik input menekankan pembaruan kompetensi. Fokus utamanya adalah penutupan kesenjangan kompetensi digital melalui revisi training, mentoring dua arah, dan penguatan literasi digital.
2. Titik proses menekankan pentingnya tata kelola kerja yang melindungi independensi. Fokus utamanya adalah penerapan strategi 3D, SOP independensi, serta disiplin evidence management dalam praktik harian.
3. Titik output menekankan kualitas laporan sebagai produk utama profesi. Fokus utamanya adalah menghasilkan laporan yang objektif, ringkas, jelas, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, transformasi SDM tidak boleh berhenti pada pelatihan teknis semata, tetapi harus mencakup tata kelola kompetensi, tata Kelola proses, dan tata kelola output.

Poin-poin analitis mengenai rantai kausal masalah dan solusi adalah:

1. Kesenjangan kompetensi digital menyebabkan evidence lemah dan laporan tidak konsisten.
2. Evidence yang tidak traceable menyebabkan laporan sulit diverifikasi.
3. Tekanan pemangku kepentingan meningkatkan risiko bias. - Laporan yang tidak audit-ready menurunkan kredibilitas profesi. - Solusinya adalah pelatihan digital reporting, SOP dokumentasi dan audit trail, strategi 3D, serta standarisasi format dan quality control.

Analisis ini menunjukkan bahwa model transformasi yang ideal harus memutuskan rantai masalah dari hulu ke hilir. Jika input kompetensi diperkuat, proses kerja dijaga dengan baik, dan output laporan distandarkan, maka kredibilitas surveyor maritim independen akan lebih terjamin.

Pembahasan Terintegrasi terhadap Pertanyaan Penelitian

Secara keseluruhan, hasil penelitian menjawab tiga pertanyaan penelitian.

1. Tingkat kompetensi surveyor maritim independen saat ini menunjukkan adanya kesenjangan digital yang masih nyata, terutama pada digital reporting, evidence management, dan penggunaan tools modern.
2. Profesionalisme dipraktikkan melalui kemampuan menjaga independensi di tengah tekanan pemangku kepentingan, dengan strategi 3D sebagai mekanisme kerja utama.
3. Tuntutan layanan dari pemangku kepentingan menekankan kecepatan, akurasi, objektivitas, dan traceability sebagai standar utama kualitas laporan.

Temuan-temuan ini menegaskan bahwa transformasi SDM surveyor maritim independen harus dipahami sebagai proses integratif antara kompetensi teknis-digital, profesionalisme etis, dan tata Kelola dokumentasi. Jika salah satu unsur lemah, maka laporan menjadi kurang defensible dan kredibilitas profesi menurun. Sebaliknya, jika input kompetensi, proses independensi, dan output kualitas laporan selaras, maka surveyor mampu menjawab tuntutan industri maritim yang semakin cepat, transparan, dan berbasis evidence.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa transformasi SDMsurveyor maritim independen

di perusahaan jasa survei maritim di Indonesia merupakan kebutuhan yang mendesak seiring dengan meningkatnya digitalisasi, percepatan layanan, dan tuntutan akuntabilitas dalam industri maritim. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama profesi surveyor maritim independen tidak hanya terletak pada penguasaan aspek teknis survei, tetapi juga pada kemampuan menyesuaikan diri dengan dokumentasi digital, menjaga kualitas expert judgement, dan mempertahankan independensi laporan di tengah tekanan berbagai pemangku kepentingan.

1. Kesimpulan Rumusan Masalah Pertama

Transformasi kompetensi SDMSurveyor maritim independen belum berlangsung secara merata. Penelitian menemukan adanya kesenjangan antara penguasaan kompetensi teknis dan kompetensi digital pada para pelaku profesi. Surveyor senior memiliki keunggulan pada pengalaman lapangan, intuisi teknis, dan kemampuan membaca kondisi riil objek survei, namun belum seluruhnya adaptif terhadap digital reporting, evidence management, dan penggunaan alat dokumentasi modern. Sebaliknya, surveyor yang lebih muda cenderung lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, tetapi belum selalu memiliki kedalaman expert judgement dan keteguhan profesional saat menghadapi dinamika pemangku kepentingan.

Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi kompetensi surveyor maritim independen tidak cukup dimaknai sebagai penguasaan alat digital semata, melainkan sebagai proses integrasi antara pengalaman teknis, kemampuan analitis, keterampilan pelaporan, dan literasi digital. STCW 2010 Manila Amendments relevan sebagai referensi arah pengembangan kompetensi maritim modern, namun belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan profesi surveyor maritim independen yang bekerja dalam konteks survei independen. Oleh karena itu, diperlukan model pengembangan SDM yang lebih spesifik terhadap kebutuhan profesi ini, khususnya pada aspek digital reporting, technical investigation, report writing, dan pengelolaan bukti.

2. Kesimpulan Rumusan Masalah Kedua

Profesionalisme surveyor maritim independen diuji secara nyata melalui tekanan, ekspektasi, dan upaya memengaruhi narasi laporan oleh pemangku kepentingan. Tekanan tidak selalu muncul sebagai intervensi langsung, tetapi juga melalui persuasi halus, harapan pelunakan bahasa, atau penonjolan temuan tertentu. Situasi ini menunjukkan bahwa independensi tidak cukup dipahami sebagai prinsip normatif, melainkan harus dijalankan sebagai keterampilan profesional yang aktif dan konsisten.

Penelitian ini menemukan bahwa strategi menjaga fairness dan independensi laporan dapat dirumuskan melalui pendekatan **3D: Data, Diplomasi, dan Dokumen**.

- a. Data menjadi dasar objektivitas melalui observasi, pengukuran, foto, dan dokumen pendukung.
- b. Diplomasi menjadi keterampilan menyampaikan posisi profesional tanpa konflik yang tidak perlu.
- c. Dokumen menjadi basis akuntabilitas yang melindungi surveyor ketika hasil kerja diuji. Dengan demikian, profesionalisme surveyor maritim independen bergantung tidak hanya pada kompetensi teknis, tetapi juga pada integritas etis, kemampuan komunikasi, dan kedisiplinan dokumentasi.

3. Kesimpulan Rumusan Masalah Ketiga

Dari perspektif marine insurance broker dan marine underwriter, kualitas surveyor maritim independen dinilai dari kemampuan menghasilkan laporan yang cepat, akurat, objektif, terdokumentasi, dan memiliki ruang lingkup yang jelas. Stakeholder eksternal tidak hanya membutuhkan laporan yang benar secara teknis, tetapi juga laporan yang mudah dipahami, dapat ditelusuri, serta cukup kuat mendukung proses underwriting, claim, dan evaluasi risiko. Hal ini menegaskan bahwa kepercayaan industri terhadap surveyor maritim independen sangat ditentukan oleh konsistensi kualitas laporan dan reputasi independensinya.

Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi profesi surveyor maritim independen harus dibaca dalam ekosistem yang lebih luas. Kualitas kerja surveyor tidak hanya diukur dari standar internal profesi, tetapi juga dari bagaimana hasil kerjanya dinilai dan digunakan oleh pihak eksternal yang bergantung pada laporan survei.

4. Kesimpulan Umum

Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa model transformasi SDM surveyor maritim independen yang ideal dibangun atas integrasi kompetensi teknis-digital dan profesionalisme etis. Kompetensi teknis-digital memungkinkan surveyor merespons kebutuhan industri yang cepat, terdokumentasi, dan berbasis evidence. Profesionalisme etis memastikan seluruh proses survei dan penyusunan laporan tetap berlandaskan objektivitas, independensi, dan fairness. Secara ekonomis, pelatihan, mentoring, dan penguatan kompetensi digital perlu dipandang sebagai investasi SDM yang meningkatkan produktivitas dan menekan biaya akibat kesalahan laporan maupun sengketa klaim (Tucker, 2011). Dengan demikian, kualitas laporan tidak hanya ditentukan oleh apa yang ditemukan surveyor di lapangan, tetapi juga oleh bagaimana temuan dikumpulkan, ditafsirkan, dikomunikasikan, dan dipertahankan secara profesional. Jika salah satu unsur lemah, risiko bias laporan, penurunan kredibilitas profesi, dan sengketa claim akan meningkat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Perusahaan Jasa Survei Maritim

Perusahaan jasa survei maritim perlu menyusun program pengembangan SDM yang berbasis integrasi teknis dan digital. Program pelatihan internal sebaiknya tidak hanya fokus pada peningkatan kemampuan teknis survei, tetapi juga pada digital reporting, pengelolaan bukti elektronik, dokumentasi visual, dan penyusunan laporan audit-ready. Selain itu, perusahaan perlu mengembangkan mekanisme mentoring dua arah, di mana surveyor senior mentransfer pengalaman teknis dan expert judgement, sementara surveyor junior mempercepat adopsi teknologi dan digital workflow. Perusahaan juga perlu menyelenggarakan pelatihan profesionalisme dan diplomasi etis agar surveyor mampu menghadapi tekanan pemangku kepentingan tanpa mengorbankan independensi laporan.

Perusahaan disarankan melakukan audit kualitas laporan secara berkala untuk memastikan standar accuracy, brevity, clarity, objektivitas, dan keterlacakan bukti tetap terjaga. Audit ini penting untuk mencegah budaya *tick box survey* yang dangkal dan memastikan bahwa setiap laporan benar-benar mencerminkan hasil survei yang bermutu.

2. Saran untuk Industri Maritim dan Asuransi

Pelaku industri maritim dan asuransi, termasuk owner, buyer, broker, dan perusahaan asuransi, perlu membangun pemahaman bersama mengenai independensi surveyor maritim independen sebagai syarat terciptanya laporan yang kredibel dan minim sengketa. Industri juga perlu mendorong pengembangan standar kompetensi yang lebih spesifik bagi surveyor maritim independen, terutama pada aspek technical investigation, digital evidence, report writing, dan ethical independence. Di samping itu, kolaborasi lintas pihak perlu diperkuat melalui forum pembelajaran bersama yang mempertemukan surveyor, broker, underwriter, dan pengguna jasa lain untuk menyamakan ekspektasi terhadap kualitas laporan survei.

3. Saran untuk Akademisi dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah informan yang lebih luas dengan cakupan yang lebih beragam, termasuk owner, buyer, P&I Club, atau regulator, agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, studi kuantitatif atau *mixed methods* dapat digunakan untuk menguji hubungan antara kompetensi digital surveyor maritim independen, kualitas laporan, dan tingkat sengketa claim. Kajian berikutnya juga dapat difokuskan pada perumusan model pelatihan atau sertifikasi profesi yang lebih sesuai dengan

kebutuhan industri maritim Indonesia, terutama dalam konteks pasca-STCW 2010 Manila Amendments.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui, yaitu:

1. Jumlah dan cakupan informan masih terbatas, yaitu hanya tiga informan yang mewakili sebagian kecil ekosistem survei maritim.
2. Penelitian berfokus pada satu konteks perusahaan, sehingga dinamika yang ditemukan mungkin berbeda dengan praktik di perusahaan atau wilayah lain.
3. Kualitas data sangat bergantung pada keterbukaan informan, sehingga terdapat kemungkinan bahwa beberapa pengalaman tidak terungkap secara lengkap.
4. Observasi lapangan masih terbatas, sehingga dinamika lapangan belum sepenuhnya tertangkap secara intensif.

Keterbatasan tersebut tidak mengurangi nilai temuan, tetapi justru membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan informan, memperdalam observasi, dan menguji model transformasi SDM surveyor maritim independen dalam konteks yang lebih luas.

Referensi

- Autsadee, Y., Jeevan, J., Mohd Salleh, N. H. B., & Othman, M. R. B. (2023). Digital tools and challenges in human resource development and its potential within the maritime sector through bibliometric analysis. *Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping*, 7(4). <https://doi.org/10.1080/25725084.2023.2286409>
- Belabyad, M., Kontovas, C., Pyne, R., & Chang, C.-H. (2025). Skills and competencies for operating maritime autonomous surface ships (MASS): A systematic review and bibliometric analysis. *Maritime Policy & Management*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/03088839.2025.2475177>
- Emad, G. R., & Ghosh, S. (2024). Identifying challenges in designing and implementing a skills and competency framework for future seafarers: A systematic literature review. *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/18366503.2024.2356365>
- International Institute of Marine Surveying. (2019, November 8). The role of the marine surveyor – A P&I club's perspective. <https://www.iims.org.uk/the-role-of-the-marine-surveyor-a-pi-clubs-perspective/>
- International Institute of Marine Surveying. (2023, December). The Report Magazine (Issue 106). <https://iims-media-library.s3.eu-west-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/11/28155536/The-Report-December-2023.pdf>
- International Institute of Marine Surveying. (n.d.). Who we are. <https://www.iims.org.uk/about/who-we-are/>
- International Maritime Organization. (n.d.). STCW Convention. <https://www.imo.org/en/ourwork/humanelement/pages/stcw-convention.aspx>
- Theotokas, I. N., Lagoudis, I. N., & Raftopoulou, K. (2024). Challenges of maritime human resource management for the transition to shipping digitalization. *Journal of Shipping and Trade*, 9(1), 1–23. <https://doi.org/10.1186/s41072-024-00165-0>
- International Institute of Marine Surveying, The Report Magazine December 2023. <https://www.iims.org.uk/download/640/>
- International Institute of Marine Surveying, The Report Magazine June 2020. <https://www.iims.org.uk/download/4/>
- Economics For Today 7Th Edition, Irvin B, Tucker
<https://drive.google.com/file/d/1qu6Ev-fmmQOvJlIMTeOKAdrpQ91Kr4w3/view?usp=sharing>
-